BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi membawa perkembangan yang cukup besar dalam berbagai aspek kehidupan. Cara pandang masyarakat pada dunia perbisnisan terutama transaksi di pasar modal menyebabkan adanya nilai jual beli mata uang *cartal* (tunai) dan uang *virtual* (*bitcoin* dan *ethereum*) yang digunakan sebagai sarana investasi pasar modal.

Sarana pasar modal dalam dunia *virtual* bagi para trader untuk menghindari deteksi oleh otoritas dengan berbagai cara.¹ Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat maju di era kontemporer sekarang banyak membawa dampak perubahan dalam bertransaksi yang pada awalnya menggunakan uang tunai sekarang mulai bergeser menggunakan uang non tunai dengan salah satu bentuk teknologinya melalui kriptografi (*cryptocurrency*).

Transaksi yang maju melalui internet ini tidak memiliki peraturan atau persetujuan yang berkaitan dengan metode pembayaran tersebut, hingga sekarang penggunaan uang *virtual* belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia karena tidak diakuinya sebagai metode pembayaran yang legal.

¹Novariza dkk, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, 2018, hlm. 35.

selain itu, *bitcoin* tidak diizinkan oleh Bank Indonesia melalui peraturan 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang menyatakan bahwasanya penyelenggara layanan sistem pembayaran dilarang memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan mata uang *virtual*. Selain itu dalam peraturan Bank Indonesia terkait penyelenggaraan teknologi finansial 19/12/PBI/2017, Pasal 8 a mengatur penggunaan *bitcoin* sebagai alat pembayaran. *Cryptocurrency* saat ini sangat populer dalam beberapa tahun terakhir seperti *bitcoin* dan *ethereum* telah banyak mengubah cara kita bertransaksi dan menyimpan nilai mata uang.

Namun, perkembangan ini juga membawa resiko terutama dalam hal pencucian uang. Sehingga pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada aset *bitcoin* menjadi isu yang semakin penting dalam ranah hukum. Alasannya adalah bahwa *bitcoin* memungkinkan transfer nilai yang cepat, relatif, anonim dan lintas batas tanpa keterlibatan pihak ketiga yang menghasilkannya menjadi alat potensial untuk para pelaku pencucian uang bagi pelaku menyamarkan jejak kejahatannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi ini ada konsekuensi negatif dari kemajuan tersebut, yakni modus kejahatan baru yang muncul berkat kemajuan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana pencucian uang biasanya bersifat fisik. secara artistik untuk menyembunyikan data pada aplikasi yang sebenarnya melawan hukum dengan membuatnya sebagai

sumber pendapatan yang legal dengan membatasi kebebasan kreatif dalam memanipulasi dunia nyata sehingga para pelaku lebih leluasa dalam melakukan aksinya.²

Kemajuan teknologi menjadi salah satu jenis yang dapat digunakan oleh pelaku yang melakukan kesalahan dengan adanya kemajuan ini, kejahatan dan modus yang digunakan semakin bervariasi yang salah satunya menggunakan sarana *cryptocurrency*. Apabila kita analogikan, jika ini terjadi di dalam dunia nyata *cryptocurrency* ada kemungkinan bahwa “*bitcoin*” juga dikenal sebagai uang, karena nilai tukar berbagai mata uang untuk satu *bitcoin* tidak berbeda. Penggunaan jasa dapat mengubah komoditas yang mereka peroleh dari transaksi online ke nilai setelah melakukan jual beli *bitcoin*, walaupun pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan mengawasi seluruh transaksi *bitcoin* hal ini tetap membuat eksistensinya transaksi *bitcoin* di Indonesia belum ada posisi yang jelas.³

Di Indonesia sebelumnya pernah terjadi perkara pencucian uang *cryptocurrency* yakni pada kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dalam perkara penipuan dan pencucian uang terkait aplikasi *binomo* pada 3 Februari 2022, ada delapan orang yang mengaku korban

²Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money", Vol.13 Nomor 1, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, Januari 2021, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>, hlm. 2.

³Gayung utami dan Pudji Astuti, “Analisis Yuridis Penggunaan *Cryptocurrency (Bitcoin)* Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Nama Jurnal*, Volume 01 Nomor 1, 2012, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/50069/41396> , hlm. 146.

aplikasi *binomo* melaporkan Indra Kenz ke polisi. Mereka mengaku merugi sejumlah Rp 2,4 miliar. Kegiatan pencucian uang hingga penipuan merupakan bentuk satu dari berbagai pasal yang dijerat Indra Kenz. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 378 KUHP bersamaan dengan Pasal 55 KUHP, Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang transaksi elektronik. Jaksa mengungkapkan kasus ini, dengan modus awalnya penipuan dimana Indra Kenz memulai konten video di akun *YouTubenya*. Setelah melihat konten tersebut, para korban merasa tertarik dan langsung mendaftar dan bermain di permainan *binomo*.⁴

Pada penjatuhan pidana Indra Kenz dapat diketahui bahwa Undang-Undang beserta pasal dalam aspek tindak pidana pencucian uangnya masih menggunakan unsur-unsur pasal yang menjelaskan secara konvensional. Hal ini seharusnya menjadi perhatian penting bagi lembaga penegak hukum untuk merevisi atau menambah pasal baru kedalam regulasi yang mengatur secara spesifik tentang *cryptocurrency*.

Dalam perkara kriminalitas yang dilakukan oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang yang pada prinsipnya sebagai tindakan yang terpisah. Namun, tindak pidana pencucian uang tersebut terlebih dahulu harus di lihat apakah bermula dari

⁴Tim detikcom, "*Jejak Kasus Indra Kenz Berujung Vonis 10 Tahun Bui dan Aset Dirampas Negara*", <https://news.detik.com/berita/d-6406725/jejak-kasus-indra-kenz-berujung-vonis-10-tahun-bui-dan-aset-dirampas-negara>, diakses pada 25 Oktober 2023.

tindak pidana sebelumnya sehingga baru dapat dikategorikan sebagai bentuk pencucian uang.⁵ Melalui media internet atau bisa disebut *cyber crime* ini merupakan teknologi yang sangat pesat berkembang di era masyarakat modern sekarang. Melalui media internet atau bisa disebut *cyber crime* merupakan bagian dari teknologi berbasis teknologi yang sangat berkembang pesat di era masyarakat modern sekarang. Kejahatan siber menjadi nuansa baru dari kriminalitas saat ini yang menarik perhatian publik di seluruh dunia.⁶ Di dalam kasus Indra Kenz pencucian uang yang dilakukannya memiliki tindak pidana ikutan (*underlying crime*) berbentuk penipuan yang mana hal ini nantinya akan berpotensi mengganggu stabilitas dan integritas perekonomian selain membahayakan aspek penting dari kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik mengenai perdagangan menggunakan sistem elektronik. *Bitcoin* yang digunakan sebagaimana wadah yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan peraturan ini terdapat sistem pencegahan atau peringatan awal yang lebih mudah digunakan, untuk sistem pelacakan transaksi *cryptocurrency* yang bersifat anonim membuatnya menjadi instrumen yang potensial untuk kegiatan ilegal, termasuk pencucian uang.

⁵Yulianto, Bambang Waluyo, "Implikasi Hukum Tidak Diwajibkannya Pembuktian Tindak Pidana Asal (Tinjauan Pasal 69 UU NO. 8 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 77/PUU-XII/2014), *Jurnal Ilmiah USM*, Volume 10 No. 2, November 2020, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/download/2196/pdf>, hlm. 238.

⁶Yulia Monita dkk, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian *Carding*", *PAMPAS : Journal Of Crminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/360860>, hlm. 3.

Dalam hal ini pelaku tindak kejahatan akan dapat mudah melakukannya di mana pun dan kapanpun pelaku bisa menyembunyikan uang tersebut menyertai identitasnya. *Bitcoin* dijadikan sarana untuk pencucian uang lebih khusus lagi, di dalam pembayaran yang menggunakan identitas palsu, bahkan bersifat anonim memungkinkan transfer uang *virtual* tidak dapat dilacak dan bergerak. Perpindahan yang cepat menjadi sangat rumit untuk menerapkan persyaratan pelaporan dan penelusuran jejak untuk memantau pelaku tindak pidana kejahatan tersebut. Transfer uang virtual yang terjadi pada aset ini memungkinkan dilakukan tanpa bantuan dari pihak ketiga (lembaga keuangan) atau antara sesama yang mengakibatkan kerahasiaan dan kecepatan transfer nama elektronik menjadi sangat sulit bagi para penegak hukum untuk mengidentifikasi sumber uang yang diterima dalam bentuk digital.⁷

Peraturan Bappebti sangat berbanding terbalik dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Peraturan ini menjelaskan bagaimana menetapkan suatu jenis aset kripto, serta prinsip dan aturan umum penetapannya. Selain itu, ada sejumlah 229 jenis aset kripto mampu dijual di pasar fisik aset kripto. Jika tindak kriminalitas terjadi dalam peristiwa ini, masih perlu banyak perhatian penting terhadap pertimbangan regulasi yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

⁷Muhammad Ardhymas Lazuardi, Skripsi: "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Melalui Mata Uang Virtual (Bitcoin)*", Jakarta:UPN, 2019, <https://repository.upnvj.ac.id/1123/>, diakses pada 25 Oktober 2023, hlm 14.

penggunaan mata uang *virtual* menjadi alat untuk pencucian uang yang mana regulasinya belum diatur jelas oleh Undang-Undang, terutama mengenai fungsi penyedia layanan pertukaran mata uang seperti *bitcoin* sebagai pelapor.⁸

Apabila kita lihat dari mekanisme yang digunakan dalam kasus pencucian uang secara konvensional prosedur yang membedakannya dengan pencucian uang menggunakan media teknologi. pada peraturan Bappeti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Aset Kripto telah mengakui kripto sebagai komoditi yang layak menjadi subjek bursa berjangka, baik dalam bentuk uang *cartal* maupun *bitcoin*. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 hanya menyebutkan mekanisme tindak pidana pencucian uang secara konvensional perlunya melegalisasi terlebih dahulu kripto di Indonesia agar memiliki peraturan khusus mengenai tindak pidana pencucian uang melalui teknologi berbasis kriptografi.⁹ Di negara kita masih belum mengesahkan *cryptocurrency* atau mata uang digital sebagai sarana sah alat pembayaran.

Namun, di sejumlah negara telah menjadikan *bitcoin* sebagai sarana uang transaksi yang sah diantaranya El Salvador, Canada, Amerika Serikat, Denmark, Australia, Jepang, Korea Selatan, Finlandia, New Zealand dan

⁸Adi Parwoto dkk, "Analisis Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)", *JOMFHUKUM*, Volume VI Edisi 1, Januari-Juni 2019, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/articel/view/26397>, hlm. 13.

⁹*Ibid*, hlm. 147.

Russia.¹⁰ Dari berbagai negara tersebut telah merevisi rancangan Undang-Undangnya dengan melegalkan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi mata uang yang dapat diandalkan dalam rancangan Undang-Undang di Negara El Salvador salah satunya apabila kita lihat dari regulasi di Negara tersebut yang tertuang pada Pasal 7 dari Undang-Undang baru El Salvador dengan *bitcoin*, setiap perusahaan dan “agen ekonomi” lainnya di negara itu dalam menerima *bitcoin* selaku alat pembayaran untuk barang dan jasa.¹¹ Pemerintah El Salvador mengesahkan Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk mendorong masuknya investor asing, melakukan transaksi menggunakan *bitcoin* akan dibebaskan dari pajak pendapatan modal. Sehingga apabila terjadi suatu tindak pidana yang terjadi sudah dapat dikenakan Undang-Undang khusus mengaturnya.

Bahwa berdasarkan permasalahan di atas, penulis sangat tertarik dengan masalah hukum yang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat maka dengan ini penulis membuat sebuah penelitian skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY* (INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL) PADA ASSET *BITCOIN*”**.

¹⁰John Anes, “ *Negara Yang Melegalkan Bitcoin*”, <https://www.cryptomedia.id/cryptopedia/negara-yang-melegalkan-bitcoin/>, diakses pada 23 Januari 2024.

¹¹Heru Adriyanto, “*Kenapa El Salvador Pakai Bitcoin? Apa Kabarnya sekarang?*”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/827537/kenapa-el-salvador-pakai-bitcoin-apa-kabarnya-sekarang>, diakses pada 6 Maret 2024.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut penulis tertarik untuk menguraikan persoalan yang relevan dengan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui kegiatan investasi *Cryptocurrency* di Indonesia?

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan informasi sebelumnya dijelaskan oleh penulis, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan melalui *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency*.

B. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan agar mempunyai manfaat secara khusus dalam perkembangan dibidang hukum yang diteliti dan manfaat secara umum untuk keperluan praktis yang dapat disumbangkan bagi kepentingan masyarakat. Adapun manfaat yang di inginkan peneliti sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terhadap penggunaan mata uang *virtual (bitcoin)* sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah maupun masyarakat terhadap kasus tindak pidana pencucian uang melalui uang *virtual* dan eksistensinya dalam prespektif hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku *money laundering*.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena tindak pidana kejahatan di era teknologi sekarang.

C. Kerangka Konseptual

Konsep dasar penelitian ini menjabarkan hubungan antara ide hukum yang digunakan untuk memberikan pembatasan pemahaman terhadap defenisi

tertentu yang digunakan oleh peneliti sebagai pedoman selama proses pengumpulan, pengolahan dan pemeriksaan konstruksi data yang berubah menjadi landasan permasalahan yang akan diteliti. Berikut ini kerangka konseptual yang dipergunakan pada tulisan ini :

1. Analisis

Analisis merujuk pada penyelidikan sebuah fenomena guna memahami keadaan yang sebenarnya, termasuk penyebabnya dan konteksnya.¹² Riradi menggambarkan analisis sebagai kegiatan yang melibatkan pemilahan, penguraian, dan pemisahan suatu hal yang kemudian diklasifikasikan menurut kriteria tertentu, dan diupayakan untuk mencari makna serta hubungannya masing-masing.¹³

2. Bitcoin

Bitcoin adalah jenis mata uang yang berbeda dengan mata uang fisik yang diterbitkan oleh bank.¹⁴ *Bitcoin* ialah mata uang digital pertama di dunia yang berdasarkan pada konsep *cryptocurrency* atau mata uang yang dihasilkan melalui kriptografi. *Cryptocurrency* yakni aset digital yang diciptakan menjadi medium pertukaran dengan mempergunakan metode kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengawasi penciptaan unit mata uang yang

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 38.

¹³Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, “*Penelitian Analisis Adalah: Berikut Jenis dan Fungsinya*”, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6458995/pengertian-analisis-adalah-berikut-jenis-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2023.

¹⁴Willy Wong, *Panduan Praktis Memahami, Menambang dan Mendapatkan Bitcoin*, Indraprasta Media, Semarang, 2014, hlm. 1.

berpotensi agar terus berkembang di masa mendatang.¹⁵

3. *Cryptocurrency*

Cryptocurrency yaitu mata uang digital yang mempergunakan teknologi kriptografi dalam melindunginya, sulit untuk dipalsukan dan setiap transaksi mampu dilangsungkan di jaringan internet, menggunakan algoritma kriptografi tertentu.¹⁶

4. Tindak Pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*

Pencucian uang mampu didefinisikan sebagai tindakan mengubah dan menyembunyikan uang tunai ataupun aset yang didapatkan melalui kejahatan. Sehingga nampak seolah-olah bersumber dari sumber legal.¹⁷

Pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu kejahatan yang tidak terjadi di luar Indonesia saja tapi juga di negara lain. Bahkan pencucian uang juga mampu berdampak negatif yang signifikan pada perekonomian suatu negara, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ternasuk sistem perekonomian itu sendiri.¹⁸

Dalam konteks ini, pencucian uang diibaratkan sebagai tindakan membersihkan sesuatu dari kekotoran menjadi bersih. Uang yang awalnya

¹⁵*Ibid*, hlm. 9.

¹⁶Dwicaksana and Pujiyono. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Indonesia", *Jurnal Privat Law*, Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020, <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/48407>, hlm. 188.

¹⁷Fransiska Novita Eleanor, "Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol XXVI Nomor 2, Agustus 2011, <https://media.neliti.com/media/publications/12301-ID-tindak-pidana-pencucian-uang.pdf>, hlm 640.

¹⁸Herry Liyus dkk, "Perbandingan Pengaturan Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2 Nomor 1, 2021 <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12171>, hlm. 2.

diperoleh dari kegiatan ilegal dimasukan agar terlihat sah atau legal. Setelah proses pencucian uang pelaku menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri.¹⁹

5. Uang Virtual (*virtual currency*)

Uang virtual (*virtual currency*) merupakan mata uang *virtual* berbasis *bitcoin* yang disusun sedemikian rupa di dalam sebuah perangkat komputer yang dapat dialihkan seperti surat elektronik dan menjadi alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial yang bukan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia.²⁰

Kerangka konseptual ini mencakup pemahaman tentang analisis, tindak pidana pencucian uang, *cryptocurrency*, dan uang *virtual*. Dalam konteks tindak pidana *money laundering* yang melibatkan *cryptocurrency*, analisis data transaksi *cryptocurrency* menjadi penting untuk mengungkap dan menghentikan upaya pencucian uang ilegal tidak lagi terjadi di Indonesia yang belum mempunyai regulasi pengaturan hukum yang pasti. Dengan menggunakan teknologi kriptografi, *cryptocurrency* memberikan tantangan tambahan dalam identifikasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang elemen-elemen ini adalah kunci untuk

¹⁹Ismail Marzuki, "Melumpuhkan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2017, <https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/articel/view/12>, hlm 1.

²⁰Itok Dwi Kurniawan dkk, "Transformasi Penggunaan Cryptocurrency Melalui Bitcoin Dalam Transaksi Komersial Dihubungkan Dengan Diskursus Perlindungan Hukum (Legal Protection) Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7 Nomor 1, <https://media.neliti.com/media/publications/457660-none-d24e29cd.pdf>, hlm. 66.

melawan tindak pidana *money laundering* dan menjaga integritas sistem keuangan.

6. Landasan Teori

Dalam konteks diskusi tulisan ini, tentunya membutuhkan beberapa teori yang mendukung penelitian tindak pidana pencucian uang melalui *cryptocurrency* pada aset *bitcoin* melalui teknologi yang modern seperti sekarang secara umum maupun menurut beberapa ahli untuk melakukan penelitian ini, penulis menerapkan landasan teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum yakni suatu proses upaya yang berfungsi dalam menegakkan norma hukum dengan efektif berfungsi menjadi standar perilaku dalam masyarakat dan negara. Apabila kita tinjau dari aspek subjeknya, penegakkan semua subjek termasuk di dalam hukum yang sistemnya terdiri dari beberapa pemerintah yang berfungsi sebagai aparat untuk melakukan penegakkan dengan mengembalikan, menghentikan, dan menghukum individu yang melanggar Undang-Undang.

Penegakkan hukum yakni upaya dalam menciptakan konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial.²¹ Menurut pendapat Soejorno Soekanto bahwasanya penegakkan hukum yakni tentang menyatukan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam prinsip-prinsip hukum yang memiliki tujuan untuk

²¹Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm 15.

menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup.²²

Andi Hamzah mengatakan bahwa istilah “penegakkan hukum” seringkali disalah artikan hanya untuk hukum pidana saja. Namun, juga pada bidang represif. Hukum *represif* maupun *preventif* adalah sebuah istilah *enforcement* yang sekarang dianggap represif, sedangkan yang preventif adalah memberi informasi *presuasive* dan arahan disebut pemenuhan hukum, yang mempunyai artian jika pemenuhan penataan hukum atas dasar tersebut dapat diartikan sebagai penanganan atau pengendalian hukum.²³ Penegakan hukum terbagi dari dua tahap yakni :

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstraco*

Penegakan hukum pidana *in abstraco* adalah aspek dari tahapan penyusunan, yang berakhir saat Undang-Undang dibuat. Setelah proses tahap legilasi selanjutnya maka untuk masuk pada tahapan aplikasi dan tahapan eksekusi pada ketetapan perundang-undangan. Hal ini adalah sebagai perwujudan dari penegakan hukum di Indonesia untuk menegakkan hukum dalam menangani pelaku kejahatan khususnya di dunia *virtual currency*. Penegakkan hukum ini harus terdapat tiga permasalahan pokok-pokok dalam hukum pidana seperti berikut :

²²Soejarno Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 24.

²³Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 24.

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).²⁴

Penegakan hukum pidana termasuk komponen dari subset dari sistem kebijakan penegakan hukum nasional. Kebijakan hukum pidana yang berlaku di artian penegakan hukum adalah salah satu bentuk upaya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional (*policy of national development*).

Sistem penegakan hukum pidana harus dievaluasi secara menyeluruh. *In abstracto (law making and law perform)* bagian dari tahap pembuatan atau perumusan perundang-undangan dari awal sangat strategis dalam proses penegakan hukum *in concerto*. Akan tetapi, saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law perform)* dalam tahapan proses pembuatan produk yang sah kurangnya keterjalinan antara satu dengan yang lain dalam bentuk sistem norma dan substansi hukum pidana yang penting di dalamnya mencakup Undang-Undang pidana materil, pidana formil dan pelaksanaan pidana yang semestinya menggabungkan sistem hukum atau materil.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concerto*

Penegakan hukum pidana *in concerto* adalah bagian dari tahapan penjatuhan pidana. Proses pidana dalam menegakkan keadilan dan

²⁴Faisal, Muhammad Rustamaji, "Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Volume 10 Nomor 2, Juli 2021, file:///C:/Users/10/Downloads/70324-601-227491-1-10-20210730.pdf, hlm. 293.

kebenaran hukum yang membentuk upaya dilakukan untuk menciptakan Undang-Undang pada artian formil yang sempit ataupun arti materil yang luas, sebagai dasar pada setiap tindakan legal yang dilakukan oleh setiap Undang-Undang memberikan tanggung jawab dan otoritas kepada subjek hukum dan aparat penegakan hukum yang resmi untuk memastikan standar hukum yang diberlakukan pada kehidupan masyarakat dan negara.²⁵ Ada berbagai permasalahan yang rumit disebabkan karena faktor yang membawa pengaruh seperti berikut :

- a) Isi peraturan perundang-undangan
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat
- c) Moralitas dari penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.²⁶

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa tugas dari penegakan hukum dimaksudkan guna mengaktualisasi standar hukum supaya sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mengubah sikap atau perilaku manusia ke dalam bentuk kerja yang telah ditetapkan oleh hukum. Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana kejahatan secara virtual ini penegakkan hukum yang dilakukan bukanlah penegakkan hukum yang biasa akan tetapi sudah masuk keranah *cyber* untuk melacak para pelaku yang anonim.

2. Teori Kepastian Hukum

Prinsip hukum haruslah meyakinkan dan adil. Salah satu tujuan utama

²⁵Abidin Farid Zainal, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 35.

²⁶Sajipto Rahardjo, *Op, Cit.* hlm.20.

hukum adalah untuk menegakkan keadilan melalui memastikan kepastian hukum. Implementasi hukum merupakan wujud konkret dari kepastian hukum, dimana Undang-Undang ditegakkan terhadap setiap tindak pidana tanpa memandang pelakunya. Kepastian hukum memungkinkan setiap individu untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, serta mengetahui apa yang dapat diharapkan jika melanggar hukum yang berlaku. Keberadaan kepastian hukum sangat penting, khususnya bagi norma hukum yang tertulis.

Tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan maknanya dikarenakan tidak mampu berfungsi menjadi panduan bagi perilaku individu. Hal ini juga mencakup menghindari keraguan dan menjaga konsistensi dalam sistem hukum, sehingga norma yang berbeda tidak bertentangan atau menimbulkan konflik. Keamanan hukum ini bergantung pada penerapan hukum yang jelas, akurat, dan konsisten dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pemaparan Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua aspek, yaitu penentuan fakta dan keamanan hukum.²⁷ Pertama bagaimana hukum dapat dibentuk dalam hal yang spesifik atau dapat diartikan Pihak yang menemukan keadilan ingin mencari tahu hukum yang berlaku dalam hal tertentu sebelum memulai perkara dalam persidangan. Kedua, stabilitas hukum merujuk pada keamanan hukum. yang dalam paradigmanya

²⁷Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume1 Nomor 1, Juli 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325> , hlm. 14.

positifisme di defenisikan bahwa Semua aturan yang serupa harus dilarang oleh hukum agar menjadi satu-satunya.

Gustav Radbruch menyatakan bahwasanya kepastian hukum yakni salah satu tujuan utama dalam hukum, dan mampu dianggap menjadi bagian dari usaha guna meraih keadilan.²⁸ Dengan kepastian hukum, setiap individu mampu menimbang konsekuensi yang akan mereka hadapi bilamana mereka melakukan tindakan hukum tertentu.²⁹

Hukum yang ditegakkan oleh pihak lembaga penegak hukum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ketidakpastian yang berkaitan dengan hukum akan menyebabkan kekacuan dalam kehidupan sosial dapat mengakibatkan suatu tindak main hakim sendiri.

3. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum pidana secara umum adalah bagian semua peraturan yang dilarang hukum termasuk dalam tindak pidana, dan bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatannya. Secara teoritis, sejumlah besar doktrin dari pendapat para ahli memperdebatkan bagaimana memahami kebijakan hukum pidana.

²⁸Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95

²⁹Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada 3 Oktober 2023.

Marc Ancel memaparkan bahwasanya "ilmu kejahatan kontemporer" terdiri dari tiga bagian "*cryminology*", "hukum kejahatan" dan "politik hukum".³⁰ Kebijakan hukum pidana pada dasarnya lebih dari sekedar teknik perundang-undang yang mampu dilakukan dengan sistematis dan normatif. Disamping itu, kebijakan hukum pidana membutuhkan pendekatan yang dapat dilaksanakan secara yuridis faktual yang memungkinkan berupa analisis dari perspektif sosiologis, historis, dan komparatif. Bahkan bidang sosial lain melalui konsistensi yang signifikan dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional secara keseluruhan.³¹

Barda Nawawi berpendapat bahwa "Kebijakan Hukum Pidana" dapat berasal dari "politik" (bahasa Belanda) dan "*policy*" (bahasa Inggris). diartikan "Politik Hukum Pidana", juga dikenal dengan istilah "politik hukum pidana", "Politik Hukum Pidana", atau "*strafrechtspolitik*", menurut buku Barda Nawawi Arief, Marc Ancel memaparkan bahwasanya, bersama dengan "kriminologi" dan "hukum pidana", "politik pidana" yakni suatu bagian dari Sains Pidana Modern³² Konkretisasi, implementasi, atau fungsionalisasi hukum pidana adalah proses melalui mana kebijakan hukum pidana diterapkan :

³⁰Marc Ancel, *Social Defence A. Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 4-5.

³¹Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2008, hlm. 24.

³²*Ibid.* hlm. 26.

a. Kebijakan formulasi atau legislatif

Fase perumusan hukum pidana merupakan fase kunci dalam usaha pencegahan serta penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Dalam tahapan ini, otoritas legislatif berwenang dalam menetapkan dan melakukan perumusan perbuatan yang mampu dijatuhi pidana. Fokus utamanya adalah pada masalah inti hukum pidana, contohnya yakni tindakan yang mengesampingkan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang mampu diberlakukan oleh penyusun Undang-Undang. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan seringkali tergantung pada pelaksanaan dan eksekusi tahapan ini

b. Kebijakan aplikatif atau yudikatif

Dalam hal penegakan hukum atau pengadilan menerapkan hukum pidana ke dalam kebijakan administratif atau eksekutif pelaksanaan hukum pidana, tahap aplikatif atau yudikatif disebutkan³³

4. Orisinalitas Penelitian

Menurut penelitian yang dilaksanakan, penulis menemukan penelitian yang mendiskusikan Undang-Undang sehubungan dengan tindak pidana pencucian uang ataupun *money laundering* melalui *cryptocurrency* pada *bitcoin* atau peraturannya pada Undang-Undang pencucian uang. Sebaliknya, ada penelitian yang mendiskusikan tindak pidana pencucian uang

³³*Ibid.* hlm.78-79.

menggunakan mata uang *virtual*. penelitian tersebut dengan informasi berikut :

1. Skripsi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang *Money Laundering* Pada Aset *Cryptocurrency*” oleh Octiano Saputra Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi pada tahun 2023 yang mana penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan pengaturan *cryptocurrency* dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Jurnal berjudul “Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Tindak Pidana berkaitan dengan *Virtual Cryptocurrency* di Indonesia ” oleh Deslaz Rannu Handicha Volume 22 Nomor 1 Tahun 2020 yang mana penelitian ini menjelaskan kejahatan yang menggunakan virtual *cryptocurrency*, sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat yang mana *virtual cryptocurrency* belum ada pengaturan pidananya secara jelas di Indonesia

5. Metode Penelitian

Suatu penelitian, tentunya membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian

hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif terdapat pengertian lain yakni dengan artian penelitian kepustakaan atau studi dokumen, dikarenakan penelitian ini banyak mengambil bersumber dari data sekunder yang berada di perpustakaan dan juga bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, ataupun dokumen lainnya.³⁴

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang mana mengacu kepada peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang komoditi aset kripto serta dibantu dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal hingga berita faktual, kemudian menganalisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran hukum (*hermeutik*).

2. Pendekatan penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang mana pendekatan ini berfokus kepada hukum positif atau aturan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Uraian pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai berikut :

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.14.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statuate Approach*)

Di dalam metode Perundang-undangan ini yang dilakukan adalah memeriksa semua peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dikaji kemudian dianalisa dari aspek regulasi *cryptocurrency* dengan aset *bitcoin* yang digunakan sebagai sarana pelaku kejahatan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dijalankan dengan melakukan peninjauan atas kasus-kasus yang relevan dengan persoalan tersebut dan menghasilkan keputusan pengadilan yang sah. Kasus ini tidak terbatas pada wilayahnya; itu bisa terjadi di Indonesia atau di negara lain. Pada pendekatan kasus ini, analisis utama yakni *ratio decidendi*, atau alasan yang dipilih hakim untuk membuat keputusan.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Di dalam Metode ini dilakukan dengan menemukan dan memahami setiap konsep hukum yang disebutkan dalam doktrin dan perlindungan hukum. Dengan pemahaman ini, peneliti akan dapat membangun argumen hukum dan memecahkan masalah hukum dengan menggunakan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan.³⁵

³⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2011, hlm. 199.

3. Pengumpulan bahan hukum

Pada penelitian ini, hukum normatif menggunakan isu hukum yang selalu membahas sistem norma yang dipergunakan menjadi pembenaran preskriptif terkait fenomena hukum. Karena sistem norma adalah kaidah ataupun ketapan, objek penelitian hukum normatif adalah kaidah aturan hukum itu sendiri.³⁶ Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berikut digunakan menjadi sumber data untuk penelitian ini sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah tentang penyusun ketetapan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim adalah bahan hukum primer penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan hukum primer berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE
4. Peraturan Bappeti Nomor 8 Tahun 2021 tentang komoditi aset kripto

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer mampu menjadi landasan untuk menelaah serta memahami bahan hukum sekunder, yang mana ialah kumpulan publikasi

³⁶Mukti Fajar, *Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 36.

terkait hukum yang bukan termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis seperti kamus hukum, buku teks, jurnal-jurnal, dan analisis-*analisis* terhadap putusan-putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Di dalam materi hukum ini tepatnya digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer yang menyediakan arahan dan ringkasan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, maupun *ensiklopedia*.

d. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis data karena tujuan penelitian ini yakni guna memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menjelaskan masalah kompleks

6. Sistematika Penulisan

Skripsi ini tersusun atas empat bab. untuk menjelaskan dan menguraikan semua masalah dengan baik agar memudahkan dalam memahami materi yang ditulis, maka dikategorikan secara sistematis dan dimuat dengan mempertimbangkan standar penulisan skripsi berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini di uraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*
(INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL)
PADA *ASSET* BITCOIN**

Pada bab ini membahas bagian dari tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal pencucian uang, proses pencucian uang, pengertian *cryptocurrency*, pengaturan mengenai *cryptocurrency*, pengertian *virtual currency* dan karakteristik *virtual currency*

**BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG MELALUI *CRYPTOCURRENCY*
(INVESTASI TRADING SAHAM MATA UANG VIRTUAL)
PADA *ASSET* BITCOIN**

Hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan bagaimana pengaturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan melalui *cryptocurrency* pada aset *bitcoin* di Indonesia, bagaimana kebijakan hukum tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) dalam kegiatan investasi *trading* melalui *cryptocurrency* di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Di dalam bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan atas uraian-uraian pada bab sebelumnya serta melampirkan saran yang berkenaan dengan pembahasan penulis yang ada dalam skripsi ini daftar pustaka yang menjadi acuan dan sumber penelitian penulis.